



**KETAHANAN PANGAN MENUJU KEDAULATAN PANGAN BAGI INDONESIA
ADALAH KENISCAYAAN**

**FOOD SECURITY TOWARDS FOOD SOVEREIGNTY FOR INDONESIA IS A
NECESSITY**

Prof. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsa, IPU

Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ)
Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12440
Email: mohammadjafarhafsa@gmail.com

Naskah Diterima : 11 September 2023
Naskah Direvisi : 20 September 2023 -
12 Januari 2024
Naskah Disetujui : 11 Maret 2024

Kata Kunci:

Ketahanan;
Pangan;
Kedaulatan
Pangan;
Keniscayaan

Abstrak

Artikel ini membahas sektor pangan yang masih memiliki posisi penting di Indonesia dalam mendorong pencapaian pembangunan nasional yang memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Desain penelitian ini adalah *literature review* yang sumbernya seperti: jurnal, buku, internet, dan pustaka lain. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masalah terkait beberapa tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia meliputi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berimplikasi pada tingkat konsumsi, luas lahan pertanian yang semakin menurun akibat konversi lahan, pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis juga masih bergantung dari impor, permasalahan adopsi teknologi. Agar dapat dicapai kedaulatan pangan, perlu: (1) Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, (2) Stop impor pangan khusus untuk beras, jagung, dan daging sapi, (3) Stop impor pangan khusus untuk komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai merah, (4) Reforma agraria, dan (5) Penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani.

Keywords:

Security;
Food; Food
Sovereignty;
Inevitability

Abstract

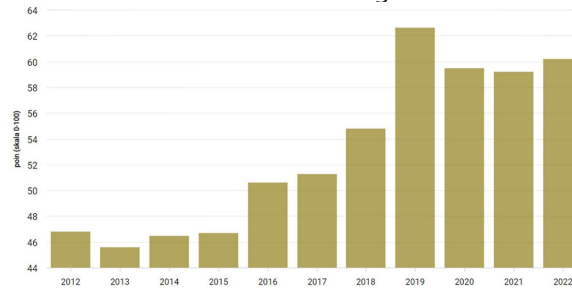
This article discusses the food sector still has an important position in Indonesia in driving the achievement of national development, which has an influence on the rate of economic growth. The design of this research is a literature review whose sources include journals, books, the internet, and other libraries. The results of this research reveal that problems related to several challenges in realizing food security in Indonesia include high population growth rates, which have implications for consumption levels; agricultural land area, which is decreasing due to land conversion; meeting the needs of several strategic food commodities, which also still depend on imports; and problems with technology adoption. In order to achieve food sovereignty, it is necessary to: (1) build food sovereignty based on people's agribusiness, (2) stop food imports specifically for rice, corn and beef, (3) stop food imports specifically for soybeans, shallots and red chilies, (4) Agrarian reform, and (5) Alleviating agricultural poverty and regenerating farmers.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi isu kontemporer yang terkadang dianggap sebelah mata, namun pada kenyataannya memiliki signifikansi tinggi ketika masa krisis. Secara akademis, isu ketahanan pangan merupakan pendekatan yang bersifat multidisipliner, yang memerlukan beragam sudut pandang untuk menganalisa permasalahan tersebut, mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga lingkungan (Maharani, 2016). Sektor pangan masih memiliki posisi penting di Indonesia dalam mendorong pencapaian pembangunan nasional yang memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Pelengkahu et. al., 2021). Sementara Nugraha, Hestiawan & Supyandi (2016) menjelaskan bahwa ketahanan pangan dan swasembada menjadi konsep yang mendominasi kebijakan pangan pemerintah.

Development Goals (SDG's) yang menjadi agenda pembangunan dunia serta disepakati oleh 193 negara (Ishatono & Raharjo, 2016; Ramadhani & Prihantoro, 2020). Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung agenda tersebut, memiliki andil pada pelaksanaannya tujuannya untuk mengentaskan kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan (Basundoro & Sulaeman, 2020; Susiatiningsih et. al., 2022). Indonesia meresponsnya melalui tindakan yang bersifat preventif dengan cara berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan keamanan pasokan pangan nasional (Yuliawati, 2020). Data ketahanan pangan di Indonesia dapat dijelaskan pada grafik berikut.

Grafik 1. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia



Sumber: Databoks (2022)

Berdasarkan grafik di atas, Ahdiat (2022) dari Databoks meneliti bahwa keadaan pangan di Indonesia tahun 2022 cukup stabil berada di indeks 60,2. Namun demikian, keadaan sempat memburuk di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan indeks turun drastis dari 62,6 ke 59,5. Namun di Indonesia sendiri kerawanan pangan telah terjadi bahkan sebelum pandemi melanda, terutama di daerah terpencil dan miskin. Kini keadaan menjadi semakin parah ketika banyak lapangan kerja ditutup, terjadinya PHK secara besar-besaran, yang menyebabkan terjadinya sulitnya akses masyarakat terhadap sumber pangan di berbagai lapisan.

Turunnya pendapatan masyarakat juga menyebabkan kurangnya asupan pangan serta kualitas pangan yang dikonsumsi, karena harga pangan yang sulit dijangkau serta terhambatnya pasokan pangan yang membuat harga kian melambung (SMERU Research Institute, 2020). Belum lagi jika hal tersebut mengarah pada ancaman gizi buruk yang dialami oleh masyarakat karena terpaksa mengurangi konsumsi makanan ketika pendapatan menurun. Sehingga hal ini menjadi salah satu indikator dari belum terpenuhinya human security di Indonesia. Padahal, ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sehingga

baik pemerintah pusat maupun daerah menempatkan program ketahanan pangan suatu kebutuhan yang sangat penting dan bersifat urusan wajib. Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan "sistem informasi pangan dan gizi" yang terintegrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian diketahui bahwa saat ini jumlah petani Indonesia mencapai 33,4 juta orang. Jumlah generasi tua (91%) dengan usia mendekati 50 tahun hingga 60 tahun. Generasi tua ini kurang dalam penguasaan teknologi. Petani yang termasuk kategori generasi muda hanya sekitar 9% atau 2,7 juta orang. Generasi muda ini berusia antara 19-39 tahun (Farizi, 2020). Selain itu, juga terbatasnya akses dukungan layanan pembiayaan (modal) bagi petani muda. Generasi muda semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin selektif memilih pekerjaan (Werembinan et. al., 2018) dan (Arvianti et. al., 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga, terlihat bahwa ketahanan pangan juga memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan inflasi, khususnya dalam aspek keterjangkauan yang meliputi daya beli dan harga itu sendiri, pada akhirnya, kondisi ketahanan pangan

akan berpengaruh pada penciptaan iklim makroekonomi yang kondusif.

TEORI, KONSEP, DAN METODE PENELITIAN

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan" (UU No 18/2012).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.7/1996).

Ketahanan pangan dapat tercapai dengan mewujudkan: a) kedaulatan pangan (*food sovereignty*) - kedaulatan pangan adalah hak negara yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal; b) kemandirian pangan (*food resilience*)-kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam

dari dalam negeri yang dapat menjamin, pemenuhan kebutuhan yang cukup sampai perseorangan; dan c) serta keamanan pangan (*food safety*)-keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari berbagai kemungkinan yang terjadi, seperti: cemaran biologis, kimia, dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Diartho, et. al., 2021).

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk adalah salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, maka penduduk dapat hidup sejahtera dan melakukan aktivitas keseharian dengan baik. Konsumsi bahan pangan masyarakat Indonesia adalah beras, jagung dan umbi-umbian. Berdasarkan data statistik konsumsi pangan tahun 2018, beras menempati urutan pertama terbanyak dikonsumsi, yaitu sebanyak 80,641 kg/kapita/tahun. Kemudian tepung terigu 2,638 kg/kapita/tahun dan ketiga adalah jagung sebanyak 1,534 kg/kapita/tahun (BPS, 2023).

Dengan membaca angka konsumsi tersebut, maka terdapat gap yang cukup besar antara jumlah produksi dengan jumlah kebutuhan konsumsi. Tepung terigu sudah jelas kita impor, karena negara kita tidak memproduksi gandum yang merupakan bahan baku terigu. Sedangkan beras dan jagung yang tumbuh subur di negara kita, ternyata tidak mencukupi pula, sehingga harus impor dari negara, seperti Thailand dan Vietnam.

Menurut Bustanil (2005), ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan

prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Berdasarkan pada konsep dasar ketahanan pangan di atas, aspek strategis dalam ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: ketersediaan, stabilitas, akses, dan penggunaan pangan (Nurhayani, 2015).

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan menurut Yuwono et. al. (2011) adalah hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem pangan sendiri sesuai keadaan ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masing masing. Elemen dari kedaulatan pangan meliputi: (1) Produksi pangan untuk pasar domestik dan lokal; (2) Memanfaatkan usaha tani petani kecil dan keluarga yang agro-ekologis; (3) Menjamin akses tanah dan sumber-sumber daya yang vital; (4) Menjamin terciptanya harga yang adil; (5) Menghormati peran wanita dalam produksi pangan; (6) Mendorong kontrol komunitas atas sumber daya produktif, dan (7) Melindungi benih dari pematenan (Saleh 2011).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Desain penelitian ini adalah *literature review* yang sumbernya seperti: jurnal, buku, internet, dan pustaka lain. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi literatur untuk mendalami kasus dari berbagai informasi yang ada. Jenis data yang dikumpulkan, yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan pengolahan data primer oleh pihak lain.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tahap studi literatur terkait dengan masalah ketahanan pangan yang bersumber dari penelitian terdahulu dan berbagai sumber pustaka lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Analisis ini digunakan dengan cara mengklasifikasikan dan menggolongkan informasi menjadi tema-tema tertentu. Analisis tematik berfokus pada tema dan pola-pola perilaku yang dapat diidentifikasi. Untuk mengaplikasikan metode analisis ini terdapat tahapan yang perlu dilakukan, yaitu studi literatur pada penelitian terdahulu untuk mendapatkan bukti-bukti masalah yang ada, kemudian masalah tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu. Masalah yang sudah terklasifikasi kemudian akan dijawab sebagai panduan dalam perbaikan kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dan Tantangan serta Potensi Ketahanan Pangan

Upaya mencapai manusia Indonesia yang berkualitas, sangat terkait erat dengan faktor pangan dan gizi, pemenuhan kecukupan pangan dan gizi dapat tercermin dari tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, mutu maupun keragamannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan masyarakat, serta

peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi ketersediaan aneka ragam pangan yang sangat besar, sehingga pengembangan sumber pangan lokal harus didasarkan pada sumber karbohidrat seperti: ubi jalar, padi, jagung, dan ubi kayu yang mempunyai potensi diversifikasi produk yang cukup beragam hasil olahannya dan memiliki kandungan zat gizi yang beragam (Rusdiana, 2017). Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif (Yunastiti, 2008).

Meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan dan gizi adalah akibat krisis pangan 2007-2008 yang dipicu oleh krisis harga energi fosil, sehingga harga pangan membumbung tinggi, menyulitkan akses ekonomi kaum miskin terhadap pangan, tingginya harga energi berdampak langsung pada produksi pertanian melalui kenaikan biaya input semisal pupuk, dan transportasi, dapat pula berdampak pada penciptaan pasar baru bagi subsidi BBM, seperti bahan nabati untuk menghasilkan bioenergi (Nainggolan, 2011). Selain meningkatnya jumlah penduduk, kondisi lahan pertanian semakin sempit. Menurut Tambunan (2003) dengan semakin sempitnya lahan pertanian di Indonesia, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum. Rosita dalam Tambunan (2003) memperkirakan bahwa konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000-50.000 ha per tahun, yang diperkirakan jumlah petani telah mencapai sekitar 12 juta orang (Prabowo, 2010).

Permasalahan lain bahwa selain masih terbukanya peluang penggalan komoditas

baru dan mengembangkan budidaya yang sudah ada, namun masih terbatasnya budidaya, dan teknologi pasca panen, serta pemasaran produksi pertanian. Sementara itu, masih kurang efektifnya perencanaan, pelaksanaan rencana, pengawasan, dan pengendalian pembangunan pertanian yang holistik (hulu-hilir) dan berkelanjutan, sehingga kurang mensejahterakan para petani/nelayan. Berkurangnya lahan pertanian yang produktif, masih lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian secara luas, dan terbatasnya anggaran sektor pertanian (Chaireni, et. al, 2020).

Berbagai kondisi dan permasalahan kedaulatan pangan di antaranya: (1) telah terjadi konversi lahan pertanian; (2) terjadinya fragmentasi kepemilikan dan penguasaan lahan; (3) sistem distribusi input pertanian belum berjalan secara efektif; (4) kelompok tani belum berubah menjadi lembaga ekonomi; (5) kredit pembiayaan belum optimal; (6) penyuluhan dan komunikasi pertanian perlu ditingkatkan; (7) KUD dan KOPTAN belum berjalan secara efektif; (8) perencanaan dan pelaksanaan program belum terintegrasi; (9) sebagian besar petani belum mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi; (10) kemampuan dalam memilih dan menerapkan teknologi masih terbatas; serta (11) aksesibilitas petani terhadap informasi pemasaran sangat kecil (Gumbira-Sa'id, 2000).

Hal yang penting untuk dibenahi adalah sistem pengorganisasian pertanian, mayoritas organisasi-organisasi tani lebih bersifat pada sisi kemanusiaan, hubungan kekeluargaan tetapi tidak mengarah pada organisasi bisnis (Jafar, 2009). Selain itu, permasalahan lingkungan global yang perlu diantisipasi:

1. Kenaikan harga minyak bumi yang sangat fluktuatif mempengaruhi pola permintaan komoditas pangan untuk *food*, *feed*, dan *fuel*.
2. Permintaan pangan global meningkat, karena jumlah penduduk dunia terus bertambah terutama negara-negara miskin di Asia dan Afrika.
3. Fluktuasi pergerakan harga pangan di pasar internasional yang sulit diprediksi berdampak pada politik harga pangan dalam negeri.
4. Permasalahan dalam negeri yang saat ini masih menjadi kendala antara lain:
 - a. Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi;
 - b. Jumlah penduduk rawan pangan masih tinggi;
 - c. Konversi lahan pertanian masih cukup tinggi dan sulit dikendalikan;
 - d. Kompetisi pemanfaatan sumber daya air semakin meningkat;
 - e. Ketergantungan pangan pada beras masih tinggi;
 - f. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas;
 - g. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk, karena budaya dan kebiasaan makan masyarakat;
 - h. Masih terjadi kasus keracunan makanan;
 - i. Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi menyebabkan tingginya biaya pemasaran bahan.

Tantangan Ketahanan Pangan

Beberapa tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia meliputi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang berimplikasi pada tingkat konsumsi dan luas lahan pertanian yang semakin

menurun akibat konversi lahan. Pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis juga masih bergantung dari impor, permasalahan adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas juga masih terhambat karena rendahnya transfer teknologi dari lembaga penelitian formal kepada petani (Nurhemi, et. al, 2014). Secara global juga menjadi tantangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan dikarenakan:

1. Dinamika ekonomi pangan global:
 - a. Krisis pangan. Masalah pangan global merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan tingginya angka kemiskinan di dunia khususnya di negara-negara miskin dan berkembang, sehingga apabila tidak segera diatasi bersama akan mengancam keamanan dunia dan krisis sosial.
 - b. Krisis energi. Mengingat semakin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil banyak negara maju dan berkembang mulai mencari sumber energi alternatif lain pengganti minyak bumi.
 - c. Krisis ekonomi dan moneter. Krisis ekonomi global akan berdampak terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang akibat adanya kenaikan harga pangan dan bahan bakar.
2. Kompetisi pemanfaatan untuk pangan, pakan, dan energi
Sektor pertanian sebagai sumber bahan pangan menghadapi tantangan baru, yaitu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk, tetapi juga untuk memenuhi bahan baku sumber energi alternatif (*biofuel*). Kenaikan harga minyak dunia akan

berdampak terhadap melonjaknya harga pangan seperti pangan strategis.

3. Perubahan iklim global
Perubahan iklim global yang terjadi saat ini telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan munculnya krisis persediaan pangan akibat tingginya potensi gagal panen, krisis ketersediaan air untuk sektor pertanian dan peternakan
4. Keseimbangan pertumbuhan penduduk dan permintaan pangan versus produksi pertanian.
Ketahanan pangan sangat ditentukan dari berbagai sektor komoditas pangan, baik nabati maupun hewani. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar 262 juta dengan pertumbuhan 1,5 persen, maka sektor pertanian termasuk peternakan, perikanan, dan kehutanan harus ditingkatkan, baik dalam jumlah dan keragaman maupun mutu untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.

Potensi Ketahanan Pangan

Potensi ketahanan pangan di Indonesia dapat dikatakan cukup besar. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki luas lahan pertanian yang cukup besar, yaitu sekitar 137,5 juta hektare. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam lain yang dapat mendukung ketahanan pangan, seperti air, iklim, dan keanekaragaman hayati.
2. Potensi produksi pangan yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi pangan pokok

Indonesia, seperti: beras, jagung, dan kedelai, terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, produksi beras Indonesia mencapai 31,3 juta ton, produksi jagung mencapai 76,9 juta ton, dan produksi kedelai mencapai 2,9 juta ton.

3. Peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti pengembangan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan pemberian subsidi.

Meskipun memiliki potensi yang besar, ketahanan pangan Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain:

1. Sumber daya alam; Belum seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia dikelola dengan baik.
2. Keanekaragaman hayati; Negara Indonesia dikenal di dunia sebagai "bio-diversity". Anugerah Tuhan berupa kekayaan keanekaragaman hayati belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Sumber daya manusia; Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan dunia, jika SDM dikelola secara tepat. SDM berkualitas tidak hanya mampu menggerakkan sektor produksi pangan menuju kemandirian pangan, melainkan juga sebagai pasar yang menguntungkan bagi pengembangan produksi pangan dalam negeri.
4. Infrastruktur; Ketersediaan infrastruktur yang memadai pada hakikatnya memberikan landasan yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

5. Perkembangan pasar; Strategi pengembangan industri pangan harus disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan spesifik terkait karakteristik bahan pangan, proses, dan kualitas pangan yang dihasilkan.
6. Teknologi; Dalam era globalisasi persaingan dalam perdagangan komoditas pangan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, produk pangan dan industri pangan di Indonesia harus memiliki daya saing yang kuat.
7. Kelembagaan; Kemandirian pangan harus didukung oleh kelembagaan yang tangguh dan mengakar di tingkat masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan perlindungan lahan pertanian. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk melindungi lahan pertanian dari konversi.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program, seperti bantuan subsidi, pelatihan, dan akses pasar.
3. Meningkatkan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mitigasi perubahan iklim, seperti penanaman pohon dan pengembangan pertanian adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan upaya-upaya yang terintegrasi, ketahanan pangan Indonesia dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Pangan dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tantangan tersendiri di setiap negara untuk menyediakan bahan pangan bagi rakyatnya, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,7 hingga 4 juta jiwa. Hal ini berarti bahwa kebutuhan pangan bagi penduduk juga semakin besar. Di satu sisi, Indonesia merupakan negara agraris terbesar di dunia dan pertanian menjadi sumber mata pencaharian yang paling banyak ditemui, dan mengalami banyak kendala seperti persoalan gagal panen. Di sisi lain, berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, menempatkan Indonesia pada posisi pertama sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, yang mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa (Databoks, 2023). Hal ini menjadi peluang besar sekaligus menjadi tantangan ke depan bagi umat Islam Indonesia, bagaimana memproduksi dan men-supply pangan dengan standar "halal" yang memiliki daya saing di pasar global.

Namun di lain sisi, persoalan ini semakin kompleks dengan semakin berkurangnya lahan pertanian produktif yang bisa diusahakan oleh petani untuk memproduksi bahan pangan, selain karena wilayahnya semakin berkurang akibat pembangunan pemukiman, juga karena ketertarikan generasi muda untuk berprofesi sebagai petani juga sangat rendah. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka cepat atau lambat, kelangkaan bahan pangan akan terjadi dan penduduk akan mengalami kesulitan untuk

mengakses bahan pangan yang dapat berujung pada bencana kelaparan. Produksi bahan pangan dalam bidang pertanian perlu menjadi perhatian serius untuk segera ditangani.

Islam sebagai *rahmatan lil alamīn* telah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengelola pertanian untuk kemakmuran dalam sebuah masyarakat. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak dalil yang membahas dan menerangkan tentang pertanian dalam arti luas-termasuk di antaranya: perkebunan, peternakan, dan juga pengelolaan proses serta penggunaan hasilnya. Diharapkan ini menjadi panduan hidup yang dapat digunakan dalam menangani produktivitas pertanian demi menunjang ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

Permasalahan pangan, sebenarnya bukanlah terletak dari tinggi atau rendahnya daya beli. Mereka yang memiliki daya beli yang tinggi, diperhadapkan pada masalah bahwa barang yang ingin dibeli tidak tersedia dengan baik. Sedangkan mereka yang memiliki daya beli yang rendah, walaupun barang yang ingin dibeli tersedia cukup, tetapi tidak memiliki kemampuan beli, juga menjadi masalah. Oleh karena itu, dua hal yang harus menjadi perhatian adalah adanya bahan pangan yang mencukupi sekaligus terjangkau untuk mendapatkannya.

Islam memandang bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Pangan yang "halal" dan "ṭayyib" (baik) merupakan hak setiap orang, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Dalam al-Qur'an, pangan disebut sebagai salah satu nikmat Allah SWT. yang harus disyukuri. Allah SWT. berfirman dalam QS. *an-Nahl* [16]:14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ
مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

"Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan (mendapat) perhiasan yang kamu pakai; dan kamu lihat bahtera berlayar padanya, dan agar kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur."

Islam juga mengatur secara rinci tentang pangan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam, dengan konsep pangan "*halalan-ṭayyibah*", yakni pangan yang tidak saja "baik dan layak" di konsumsi oleh manusia, tapi wajib terpenuhi unsur "halal"-nya menurut standar petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa ketentuan tentang pangan dalam Islam antara lain:

Pertama, pangan harus *halal* dan *ṭayyib*. Kedua dimensi *halalan-ṭayyibah* dalam pangan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan dalam satu-kesatuan yang utuh. Halal, artinya pangan yang diizinkan oleh ketentuan syara' untuk dikonsumsi. Sedangkan *ṭayyib* adalah pangan yang mengandung unsur baik dan bermanfaat bagi tubuh. Makanan yang *ṭayyib* adalah makanan yang sehat dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Allah SWT. berfirman dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Bahkan dalam QS. *al-Maidah* [5]: 3 lebih rinci lagi makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Allah SWT. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Kedua, pangan harus cukup. Setiap orang berhak mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pangan harus merata. Pangan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak ada orang yang kelaparan. Islam juga mengajarkan umatnya untuk bersikap bijak dalam mengonsumsi pangan. Hal ini tercermin dalam beberapa hadis, antara lain:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَأَبْدَعُوا بِهِ قَبْلَ
أَنْ تَصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan shalat Maghrib dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan kalian" (HR. Bukhari/632 dan Muslim/557, 2023).

Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٍ يُقْمِنُ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ لِعَاطِمِهِ وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ

Artinya:

Dari Miqdam bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya" (HR. Tirmidzi/2302, 2023).

Dengan demikian, perspektif Islam tentang pangan sangatlah positif. Islam memandang bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dengan cara yang *halal* dan *tayyib*. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk bersikap bijak dalam mengonsumsi pangan.

Ketersediaan pangan cukup bagi masyarakat, khususnya keluarga, merupakan kebutuhan dasar untuk keberlanjutan hidup. Allah SWT. berfirman dalam QS. *al-A'raf* [7]:58:

وَالْبَلَدَ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya:

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Namun, sebagai seorang Muslim, makan dan minum bukanlah tujuan utama atau demi memenuhi nafsu belaka, tetapi hanyalah sarana untuk menjaga kesehatan tubuh agar mampu beribadah dengan baik kepada Allah SWT. Apabila kebutuhan telah terpenuhi, maka tidak perlu berlebih-lebihan, karena bisa menjadi sumber penyakit dan kemungkinan mengurangi atau mengambil bagian dari orang lain. Allah SWT. berfirman dalam QS. *al-A'raf* [7]:31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

Makan dan minumlah kamu, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan".

Selama persediaan bahan pangan dipergunakan sebagaimana mestinya, maka pasti mencukupi kebutuhan bahan pangan seluruh umat manusia. Salah satu karya produktif umat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. adalah mencari rezeki lewat usaha pertanian, seperti sabdanya:

التَّيْسُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ

Artinya:

Dari Aisyah rah. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Galilah rezeki dari celah-celah (perut) bumi" (HR. Ahmad/431, 2023).

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa Islam menuntut umat manusia agar mengusahakan sebaik mungkin lahan yang ada di seluruh permukaan bumi untuk dioptimalkan, agar lahan tersebut tidak menjadi terlantar dan kurang produktif. Dalam dunia pertanian, tujuan yang ingin dicapai adalah hasil panen yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu dibuatkan perencanaan yang matang mulai dari proses pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman hingga pada saat

pengelolaan hasil panen. Perencanaan ini dikenal sebagai metode intensifikasi pertanian, yaitu metode peningkatan produksi pertanian yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengoptimalkan setiap proses tahapannya dengan baik dan maksimal.

Dari tumbuh-tumbuhan Allah menciptakan biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sebagai makanan bagi manusia. Allah berfirman dalam QS. *Abasa* [80]: 24-32:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ
صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا
فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَيْنَبًا وَوَقْضًا بَّ (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
(٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا
(٣٢) لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

Artinya:

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (24); Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air (dari langit) dengan berlimpah (25); Kemudian, Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya (26); Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian (27); Anggur, sayur-sayuran (28); Zaitun, pohon kurma (29); Kebun-kebun (yang) rindang (30); Buah-buahan, dan rerumputan (31); (Semua itu disediakan) untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu (32).

Lebih lanjut juga dijelaskan di dalam QS. *an-Nahl* [16]:11:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

Lebih lanjut Allah SWT. berfirman dalam QS. *an-Nahl* [16]:66:

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ
مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ

Artinya:

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

Kemudian Allah SWT. kembali menegaskan dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 57:

وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya:

Dan Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwā. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dari uraian di atas jelas bahwa Allah telah menyediakan beragam makanan nabati berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, serta makanan hewani berupa binatang ternak, ung- gas, dan ikan. Masing-masing kelompok makanan mempunyai nilai gizi yang berbeda, demikian juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Penyediaan sumber makanan oleh Allah bagi manusia amatlah mengagumkan. Lebih dari enam miliar manusia sekarang, demikian juga manusia sebelumnya, dikaruniai persediaan makanan dari bumi yang tiada habis-habisnya. Sumber makanan terutama berasal dari tanah berupa tanam-tanaman didukung oleh keberadaan air dan sinar matahari melalui proses fotosintesis.

Perintah Allah kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik harus selalu ditaati karena pada hakikatnya perintah tersebut adalah demi kebaikan diri manusia sendiri.

Mewujudkan Produksi Pangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) bahwa luas panen padi pada 2023 diperkirakan sekitar 10,20 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 255,79 ribu hectare atau 2,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 10,45 juta hektare. Produksi padi pada 2023 diperkirakan sebesar 53,63 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 1,12 juta ton GKG atau 2,05 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 54,75 juta ton GKG. Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,90 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 645,09 ribu ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 31,54 juta ton.

Berdasarkan hasil Survei KSA, puncak panen padi pada 2023 selaras dengan tahun sebelumnya, yaitu terjadi pada Maret dengan luas panen mencapai 1,65 juta hektare. Namun demikian, puncak panen padi pada Maret 2023 relatif lebih rendah atau turun sekitar 110,39 ribu hektare (6,27 persen) dibandingkan Maret 2022.

Realisasi panen padi sepanjang Januari-September 2023 sebesar 8,66 juta hektare atau mengalami penurunan sekitar 33,04 ribu hektare (0,38 persen) dibandingkan Januari-September 2022 yang mencapai 8,69 juta hektare. Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober-Desember 2023 diperkirakan sekitar 1,54 juta hectare (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tiga provinsi dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2023 adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, tiga provinsi dengan produksi padi terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua Barat. Penurunan

produksi padi yang cukup besar pada 2023 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di sisi lain, terdapat beberapa provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data di atas, maka perlu meningkatkan produksi pangan di setiap daerah. Peningkatan produksi pangan pokok dicapai melalui 10 kegiatan. Di antaranya yang berkenaan dengan kedaulatan pangan adalah (1) pengembangan 1.000 Desa Mandiri Benih, (2) pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar, (3) pengembangan 1.000 Desa Pertanian Organik, (4) penciptaan system inovasi nasional, (5) perluasan lahan kering 1 juta ha, (6) pendirian unit perbankan untuk pertanian, (7) peningkatan kemampuan petani dan organisasi petani, (8) pelibatan Perempuan petani/pekerja, (9) penciptaan daya Tarik pertanian bagi TK muda, serta (10) rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan bendungan (Syahyuti, et. al., 2015).

Penjabaran kedaulatan pangan mencakup: *Pertama*, hak atas lahan usaha pertanian di mana di lahan itu petani melakukan penanaman yang hasilnya setidaknya-tidaknya berguna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya; *Kedua*, hak atas sumber daya air untuk pertanian. Berdasarkan hak ini petani diberi hak untuk memperoleh alokasi air untuk kebutuhan lahannya. Itu sebab, sumber daya air harus tetap didudukkan sebagai barang publik (*public good*) yang pengelolaannya di kuasakan kepada negara; *Ketiga*, hak akses atas benih dan bibit. Berdasarkan hak ini petani berhak menanam benih atau bibit, menjadi produknya dan tidak tergantung pada daulat pasar;

Keempat, hak untuk menentukan sistem pertanian.

Berdasarkan hak ini petani diberi keleluasaan untuk menentukan metode pertanian sesuai dengan sosio-kulturnya; *Kelima*, hak atas pangan konsumsi dan pilihan. Berdasarkan hak ini petani dapat mengkonsumsi pangan sesuai dengan preferensi dan kebiasaan sesuai budaya setempat (Soetoto, 2018).

Kebijakan

Sebelum menentukan suatu kebijakan dan membangun program, dalam tahap perencanaan dan penelitian awal, salah satu konsep yang dapat diadopsi, yaitu: *policy brief* yang dikeluarkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2006) dan *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2016) dengan poin utama sebagai berikut:

Tabel 1. Policy Brief oleh FAO dan OECD

FAO (2006)	OECD (2016)
Fokus pada ketahanan pangan	Mengubah kebijakan produksi dan distribusi yang menghambat <i>output</i>
Membina pertanian pedesaan yang berkelanjutan	Mengembangkan kebijakan yang berorientasi lingkungan dan energi terbarukan
Optimalisasi lahan pedesaan	Meningkatkan inovasi dalam men-desain kebijakan
Mengidentifikasi masalah ketahanan pangan di perkotaan	Meningkatkan kualitas lingkungan
Mengidentifikasi masalah lintas sektoral	Memastikan konsistensi dan koherensi kebijakan
Mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan nasional	

Berdasarkan tabel 3 di atas, *Policy Brief* tentang ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh FAO menjelaskan enam poin penting yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan. Secara umum, FAO mendorong untuk mengidentifikasi masalah pangan agar pemerintah dapat memetakan

kebutuhan pangan yang ada di negaranya. Selain itu, optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan sumber daya menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pangan. Partisipasi pemangku kepentingan serta kolaborasi perlu dilakukan baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun proses implementasinya.

Di sisi lain, OECD dalam publikasinya menjelaskan lima poin penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan ketahanan pangan. Poin-poin tersebut sebagian besar berorientasi pada lingkungan dan *sustainable energy*, sehingga hasil yang. Di samping hal tersebut, OECD juga mendorong efektivitas kebijakan dengan perubahan kebijakan yang dianggap perlu serta mendukung inovasi dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan (Ananta, 2023).

Kebijakan dapat mendorong ketahanan pangan dengan menciptakan pertanian berkelanjutan mulai dari reformasi kelembagaan, perubahan teknologi, reformasi pasar, dan investasi dibidang pertanian (Huang & Yang, 2017). Kebijakan lain, seperti impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti pada komoditi beras, kedelai, jagung, gula, dan daging merupakan 'alat bantu' utama bagi pemerintah dalam mewujudkan stabilitas dan ketahanan pangan nasional (Aprilianti, Amanta, & Felippa, 2020).

Ini mempunyai makna bahwa ketahanan pangan akan tercapai apabila semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Konsep ketahanan pangan antara

lain, mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan ada akses terhadap pangan.

Ketersediaan pangan yang memadai mengandung arti bahwa secara rata-rata pangan harus tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Stabilitas merujuk pada kemungkinan bahwa pada situasi yang sesulit apapun (misalnya, pada musim paceklik), konsumsi pangan tidak akan jatuh di bawah kebutuhan gizi yang dianjurkan. Sementara, akses mengacu pada fakta bahwa masyarakat yang mengalami kelaparan karena ketiadaan sumber daya untuk memproduksi pangan atau ketidakmampuan untuk membeli pangan sesuai kebutuhan (Setsmy, et. al., 2018).

Khusus untuk membangun kedaulatan pangan disebutkan akan digunakan lima pendekatan. *Pertama*, membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, yang terdiri atas empat bentuk, yaitu penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan, penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani, implementasi reforma agraria, dan pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi. Di Eropa, fakta menunjukkan bahwa saat ini koperasi tani masih terjaga eksistensinya. Penelitian Lucas et. al. (2018) menyebutkan bahwa koperasi tani di Perancis meningkatkan ekosistem pertanian dan akses pada alat-alat pertanian yang lebih canggih. Andersson et. al. (2005) juga mengungkapkan bahwa kolaborasi yang baik antara koperasi pertanian dan stakeholdernya di Swedia akan meningkatkan keberlangsungan koperasi itu sendiri serta bisnis yang dijalankannya.

Kedua, stop impor pangan khusus untuk beras, jagung, dan daging sapi. Untuk jagung disebutkan ada tiga program, yaitu: (a) peningkatan produktivitas dari 4,8 ton/ha menjadi 5,6 ton/ha; (b) pengembangan bank benih milik rakyat tani untuk daulat benih; dan (c) pengembangan pupuk organik untuk Daulat pupuk. Sementara, untuk sapi adalah membangun agroekologi dan peningkatan kapasitas peternakan rakyat.

Ketiga, stop impor pangan khusus untuk komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai merah. Terbaca dengan jelas bahwa khusus untuk kedelai ada tiga pilihan kebijakan, yaitu: (a) peningkatan produksi dari 1,46 ton/ha menjadi 2,3 ton/ha; (b) pemerintah menjamin harga yang menguntungkan untuk petani; dan (c) mendorong pengembangan bank benih kedelai di tiap kelompok tani. Sedangkan untuk bawang merah ada dua hal, yaitu pemerintah menjamin produksi benih lokal dan mendorong peningkatan produksi dari 10,1 menjadi 11 ton/ha. Khusus untuk cabai merah juga ada dua hal, yaitu peningkatan produktivitas cabai sebesar rata-rata 0,078 ton/ha, yakni dari 6,84 ton/ha menjadi 6,918 ton/ha, dan pemerintah menjamin harga yang menguntungkan untuk petani cabai.

Keempat, reforma agraria, di mana solusi untuk reforma agraria terdiri atas tiga program, yaitu: (a) peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta ha untuk 1 juta KK petani kecil dan buruh tani tiap tahun; (b) distribusi 9 juta ha tanah untuk petani dan buruh tani; dan (c) meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian.

Kelima, penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani, berupa empat solusi, yaitu: (a) seribu desa berdaulat benih hingga tahun 2019; (b) peningkatan

kemampuan organisasi petani dan pelibatan aktif perempuan petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan; (c) rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak pada 3 juta ha pertanian; dan (d) dukungan regenerasi petani muda Indonesia.

Terlihat dengan jelas bahwa poin-poin penting dalam dokumen Nawacita menguraikan konsep dan strategi kedaulatan pangan sebagaimana pemikiran yang berkembang di level internasional. Poin pokoknya adalah pemberian akses dan kontrol yang besar kepada petani yang selama ini kurang diperhatikan, yaitu pemberian akses dan kontrol terhadap lahan pertanian melalui peningkatan hak penguasaan lahan melalui reforma agrarian dan peningkatan akses, dan kontrol kepada benih dengan membangun desa-desa mandiri benih. Kedaulatan pangan dicapai melalui lima usaha, yaitu peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Dengan demikian, tiga pilar utama dari ketahanan pangan, yaitu: (1) kesediaan pangan; (2) distribusi/ akses pangan; dan (3) konsumsi pangan (Rahmawati, 2017).

Beberapa kebijakan dan strategi yang perlu diperhatikan di antaranya; (1) kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, investasi, perdagangan yang mendorong pertumbuhan agribisnis); (2) pembangunan infrastruktur agribisnis dan pedesaan; (3) reforma agraria; (4) penyediaan sarana produksi; (5) penyediaan akses permodalan; (6) penerapan teknologi agribisnis; (7) pengembangan sumber daya manusia; (8) pengembangan kelembagaan; (9) penyuluhan agribisnis; (10) pengembangan

industri di pedesaan; (11) mekanisasi pertanian; (12) pemasaran dan perdagangan internasional; (13) standarisasi dan akreditasi; (14) karantina pertanian; (15) pelestarian lingkungan dan SDA; (16) pengembangan sistem data dan informasi; (17) peraturan dan perundang-undangan (Jafar, 2009).

Program peningkatan ketersediaan pangan di antaranya: (1) peningkatan kapasitas produksi; (2) diversifikasi pangan lokal; (3) penguatan cadangan dan sistem logistik; dan (4) pengembangan pertanian modern (Satria, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan di Indonesia terdapat beberapa tantangan ataupun hambatan yang dihadapi meliputi:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, apabila di analisis pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, artinya pertumbuhannya sangat luar biasa yang berimplikasi pada tingkat konsumsi yang menuntut akan kebutuhan pangan dan konsumsi yang meningkat sangat signifikan;
2. Luas lahan pertanian yang semakin berkurang dari waktu ke waktu akibat konversi lahan ataupun alih fungsi lahan, perubahan dari lahan pertanian ke non pertanian;
3. Pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis juga masih bergantung dari impor, permasalahan adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas juga masih terhambat karena rendahnya transfer

teknologi dari lembaga penelitian formal kepada petani artinya penerapan teknologi di bidang pertanian masih rendah yang berdampak pada hasil produksi.

Kebijakan yang perlu dilakukan di antaranya:

1. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan;
2. Stop impor pangan khusus untuk beras, jagung, dan daging sapi;
3. Stop impor pangan khusus untuk komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai merah;
4. Reforma agrarian; dan
5. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani.

Saran

Perlu dilakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan tersebut, baik upaya dari segi untuk menambahkan hasil produktivitas tanaman, perluasan akses, distribusi, maupun upaya untuk memperluas daerah pertanian tersebut, lalu adanya arahan kebijakan untuk solusi permasalahan dari pada tantangan tersebut untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan di negara Indonesia tercinta ini.

REFERENSI

- Andersson, H., Larsén, K., Lagerkvist, C.-J., Andersson, C., Blad, F., Samuelsson, J., & Skargren, P. (2005). "Farm Cooperation to Improve Sustainability". *BioOne*, 34(4), 383–387. [https://doi.org/10.1579/0044-7447\(2005\)034](https://doi.org/10.1579/0044-7447(2005)034).
- Aprilianti, I., Amanta, & Felippa. (2020). *Indonesian Food Trade Policy During Covid-19: Ringkasan Kebijakan*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- Arvianti, E. Y., Masyhuri, M., Waluyati, L. R., & Darwanto, D. H. (2019). "Gambaran Krisis Petani Muda Indonesia". *Agriekonomika*, 8(2), 168–180. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.5429>
- Ahdiat, A. (2022). "Ketahanan Pangan Indonesia Menguat pada 2022". *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/202>
- Badan Pusat Statistik (2023). *Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023*.
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional pada Era Pandemi Covid-19". Dalam, *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 27–41. <https://doi.org/10.55960/JLRI.V8I2.307>
- Databoks, C. M. A. (2023). "10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023). Diambil dari 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!" Website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa>.
- Diartho, Hr Cahyo, E. K. Lestari, D. Yunitasari, A. Lustfi, and F. Muslihatinningsih. (2021). "The Concept of Food Safety in the Economic Model of Cooperation in Situbondo District". *American Journal of Economics*, 11, no. 1: 31-35.

- FAO. (2006). "Policy Brief Changing Policy Concepts of Food Security. Food and Agriculture Organization". <http://www.foodsecinfoaction.org/>.
- Farizi, R. Al. (2020). "Petani Muda Tergerus, Dominan Petani Tua Tanpa Teknologi". 28 November 2023. Diakses dari <https://fajar.co.id/2020/04/13/petani-muda-tergerus-dominan-petani-tua-tanpa-teknologi/>.
- Gumbira-Sa'id, E. dan G.C. Dewi. (2004). "Kinerja Agribisnis Indonesia Pasca Krisis". Dalam, *Agrimedia* Vol. 8 No. 2. MMA-IPB, Bogor.
- Hafsah, Mohammad Jafar. (2009). *Membangun Pertanian (Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Huang, J., & Yang, G. (2017). "Understanding Recent Challenges and New Food Policy in China". *Global Food Security*, 12, 119–126.
- HR. Ahmad/431. (2023). الموسوعة الحديثية. Diambil dari <https://dorar.net/hadith/sharh/151723>
- HR. Bukhari/632 dan Muslim/557. (2023). Hadis: Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukan makan malam sebelum menunaikan salat Magrib dan jangan tergesa-gesa menyantap makan malam kalian! Diambil dari <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10876>
- HR. Tirmidzi/2302. (2023). *Kumpulan Hadits*. Diambil dari <https://ilmuislam.id/hadits/36771/hadits-tirmidzi-nomor-2302>
- Ishatono, & Raharjo, S. T. (2016). "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan". *Share: Social Work Journal*, 6(2), <https://doi.org/10.24198/SHARE.V6I2.13198>
- Iqbar Diaz Ananta. (2013). "Meningkatkan Kebijakan Food Estate di Indonesia". Dalam, *Jurnal Indonesia RICH*, Vol. 4, No. 1, (2023), 45 – 54 <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/64>.
- Kaman, Nainggolan. (2011). "Persoalan Pangan Global dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Nasional". *Artikel Online*. Dewas Perum Bulog.
- Lucas, V., Gasselin, P., & Van Der Ploeg, J. D. (2018). "Local Inter-Farm Cooperation: A Hidden Potential for the Agroecological Transition in Northern Agricultures". *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(2), 145–179. <https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1509168>.
- Maharani, D. C. (2016). "Mencapai Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan". *Global & Policy*, 73-83.
- Nugraha, A., Hestiawan, M. S., & Supyandi, D. (2016). "Refleksi Paradigma Kedaulatan Pangan di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Pangan Lokal di Flores Timur". Dalam, *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/agricore.v1i2.22717>
- Nurhayani, Erni. (2015). *Ketahanan Pangan di Indonesia: Laporan Semester II*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nurhemi. (2014). *Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan*.
- OECD. (2016). "Policy Brief Food and Agriculture: A New Policy Paradigm Short-Term Thinking must Give Way to Long-Term Approach". *Organization for Economic Cooperation and Development*. www.oecd.org/policy-briefs.

- Pelengkahu, S.S., Kindangen, P., & Walewangko, E.N. (2021). "Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22 (2), 46 -66.
- Rahmawati, Dwi. (2017). *Pengurangan Risiko Bencana Letusan Gunung Kelud Berbasis Ketahanan Pangan di Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. (2020). "Development Communication Strategy by Bojonegoro District Government on Applying Nawacita and Sustainable Development Goals". *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129. <https://doi.org/10.46937/18202028913>.
- Reni Chaireni¹, Dedy Agustanto, Ronal Amriza Wahyu, Patmasari Nainggolan. (2020). "Ketahanan Pangan Berkelanjutan". *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*. ISSN Vol 2/ 2020. <http://jkpl.pjj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/13>.
- Rossi Prabowo. (2010). "Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia". *Artikel Online*. Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Saleh R. (2011). *Struktur Penguasaan Tanah Masyarakat dan Upaya Membangun Kedaulatan Pangan*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Satria, Arif. (2020). "Tantangan dan Peluang Agribisnis di Era New Normal". *Makalah*, Disampaikan pada Dialog Agribisnis, 2020.
- Setsmy, Setsmy, Ayub M. Padangaran, and Ine Fausayana. (2018). "Pola Antisipasi Kerawanan Pangan dan Peran Kelembagaan Lokal pada Daerah Terpencil di Kabupaten Konawe". *Jurnal Sosio Agribisnis*, 3, no. 2.
- SMERU Research Institute. (2020). *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020*. Jakarta: Smeru.
- Soetoto, E. O. H. (2018). "The impact of Indonesia's Food Law Reform on the Concept of Food Sovereignty in Indonesia. In, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 131, No. 1, p. 012026). IOP Publishing.
- Supardi Rusdiana. (2017). "Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pangan di Indonesia". *Artikel Online*. Balai Penelitian Ternak Ciawi-Bogor.
- Susiatiningsih, H., Hanura, M., Rosyidin, M., Paramasatya, S., & Anggraheni, P. (2022). "Pencerahan Masyarakat Petani Bawang akan Skema *Food Estate* sebagai Upaya Pemenuhan SDG's di Kabupaten Temanggung". *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(4), 235–242. <https://doi.org/10.14710/JPV.2022.16215>.
- Syahyuti Syahyuti, Miftahul Azis, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Azis, (2015). "Kedaulatan Pangan Sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional". *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 33 no. 2, desember 2015.
- Werembinan, C. S., Pakasi, C. B. D., & Pangemanan, L. R. J. (2018). "Persepsi Generasi Muda Terhadap Kegiatan Pertanian di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado". *Agri-Sosioekonomi*, 14(3), 123. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.3.2018.21542>.
- Yuliawati. (2020). "Jokowi Waspada Krisis Pangan, Ini Peringatan FAO saat Pandemi Corona". <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a41c99400f/jokowi-waspada-krisis-pangan-ini-peringatan-fao-saat-pandemi-corona>.
- Yunastiti. (2008). "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat". *Artikel Online*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Yuwono T, Sri W, Dwidjono H D, Masyhuri, Didik I, Susamto S, Sunarru. (2011). *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta (ID): UGM Press.